

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sistem politik demokrasi merupakan sistem yang paling banyak digunakan dan dianut oleh berbagai negara<sup>1</sup>. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem politik demokrasi<sup>2</sup>. Bagi negara yang menganut sistem politik

---

<sup>1</sup> Berbagai macam sistem politik yang ada di dunia yaitu : (1) Monarki, merupakan sebuah sistem yang mendukung terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengambilan sistem kerajaan sebagai bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Sistem negara monarki memiliki tiga jenis, yaitu: Monarki Absolut, Monarki Konstitusional, Monarki Parlementer. (2) Republik, terbagi atas tiga jenis, yaitu: Republik Absolut, pemerintahan yang bersifat diktator. Republik Konstitusional, yang dapat menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Terakhir Republik Parlementer, yang berarti suatu negara dikepalai oleh seorang presiden, namun kekuasaan tertinggi berada ditangan perdana menteri yang memimpin kabinet. (3) Aristokrasi, merupakan sistem politik yang dipimpin oleh individu yang terbaik. (4) Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. (5) Demokrasi merupakan sistem politik yang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. (6) Otokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. (7) Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang Emir. (8) Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Untuk lebih lanjut lihat Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 105-134.

<sup>2</sup> Secara harfiah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu *democratos*, yang terdiri dari gabungan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos*. *Demos* berarti rakyat atau penduduk disuatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan (Riski Febria Nurita. *Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia*. 2015, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 6, No 1). Demokrasi adalah kekuasaan Negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan Negara ditentukan oleh rakyat. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk Negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Pada awal berjalannya demokrasi yaitu pada zaman Yunani Kuno, setiap rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga laki-laki untuk ikut serta dalam musyawarah tersebut, diberikannya kebebasan yang luas untuk setiap warga yang ikut dalam memberikan pendapatnya. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kebebasan secara luas untuk mengeluarkan pendapatnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh negaranya. Demokrasi dewasa ini tidak dapat kita temukan musyawarah yang seperti itu lagi, yang dikarenakan geografis wilayah negara yang luas, serta persebaran penduduk yang semakin padat yang sehingganya menjadi penghalang untuk melakukan cara yang serupa. Oleh sebab itu musyawarah, pengambilan keputusan dan kebijakan hanya dapat dilakukan oleh wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Rujuk Yusrizal Yasmir, *Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pasaman*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2018, hlm 19. Untuk pembahasan lebih lanjut.

demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu syarat dari demokrasi itu sendiri<sup>3</sup>. Pemilihan umum dipercaya untuk mewujudkan pengertian demokrasi tersebut sebagai wujud dari eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara. Pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negara.<sup>4</sup> Dengan demikian, Pemilihan Umum merupakan suatu cara untuk meregenerasi pemimpin baik pemimpin Pemerintahan Daerah, pemimpin Pemerintahan Pusat, Lembaga Eksekutif dan Legislatif<sup>5</sup>.

Pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam menentukan pemimpin di Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak dua belas kali, salah satunya pada tahun 2019. Berdasarkan keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013<sup>6</sup>, pemilihan umum pada tahun 2019 memiliki perbedaan

---

<sup>3</sup> Di kebanyakan Negara demokrasi, Pemilihan Umum di anggap sebagai lambang dan sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi yang dijalankan tersebut. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan serta adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap sebagai cerminan yang lebih akurat mengenai partisipasi serta aspirasi masyarakat. Untuk Lebih Lanjut Lihat Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 461.

<sup>4</sup> Triono. 2017. *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Wacana Politik. No. 2. Vol 1.

<sup>5</sup> Melalui pemilihan umum, rakyat menilai kinerja pejabat yang telah dipilihnya pada pemilihan umum sebelumnya, apabila pejabat yang dipilihnya tidak menepati janji-janji politik ataupun tidak bersikap sesuai dengan harapan rakyat, maka pada pemilihan umum berikutnya rakyat dapat menghukumnya dengan tidak memilihnya. Jadi, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat. Pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu didalamnya terdapat berbagai variasi, namun pada umumnya berkisar pada dua prinsip yaitu, 1. *Single-member Constituency* merupakan suatu daerah pemilihan memilih dua wakil, yang biasanya disebut sistem distrik. 2 *Multi-member Constituency* yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, yang biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Untuk lebih lanjut lihat Miriam Budiardjo., *Op.Cit.*, Hal 462.

<sup>6</sup> Salah satu alasan untuk dilaksanakannya pemilu secara serentak dengan menggabungkan lima pemilihan secara langsung yaitu untuk penghematan anggaran negara. Alasan ini dikemukakan sesuai dengan pengalaman negara yang telah mengeluarkan banyak anggaran diwaktu pemilu sebelumnya. Namun faktanya, dengan

dengan pemilihan umum sebelumnya, dimana pada pemilihan umum ini penggabungan terhadap lima pemilihan umum secara langsung yaitu, Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Pemilihan Umum tahun 2019 ini, diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR-RI, DPD, DPRD Kab/Kota, DPRD Propinsi dan Pemilihan Presiden.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemilu berkenan dengan proses pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh rakyat, proses ini bertujuan untuk meregenerasi pemimpin dari suatu lembaga pemerintahan. Setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu diberikan hak, kebebasan, serta kewajibannya dalam menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin. Dalam hal inilah yang sangat menarik untuk dikaji adalah perilaku memilih dari rakyat tersebut hingga ia memberikan kepercayaan dan pilihan kepada sosok calon yang dipilihnya.

Perilaku memilih merupakan aktivitas pemberian suara oleh seseorang yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau untuk tidak memilih dalam pemilu<sup>8</sup>. Perilaku memilih (*voting behavioral*) dalam suatu

---

dilaksanakannya pemilu secara serentak serta menggabungkan lima pemilihan secara langsung, anggaran yang dikeluarkan oleh negara semakin besar. Untuk lebih lanjut lihat Anonim. Detik.com. Pemilu 2019 di Soal, ini Lho 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak. <https://m.detik.com/news/berita/d-4523961/pemilu-2019-disoal-ini-lho-3-alasan-mk-perintahkan-pemilu-serentak>. Di akses pada tanggal 11Desember 2019.

<sup>7</sup> KPU Jepara. Inilah Undang-Undang KPU. <https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/> Diakses pada 5 November 2019. Pukul 19.25 WIB.

<sup>8</sup>Perilaku memilih yang dilakukan dalam bentuk, memilih (*to vote*) dan tidak memilih (*not to vote*). Apabila seseorang memutuskan untuk memilih, maka ia akan memilih calon atau partai politik dalam pemilihan umum, dan jika ia memutuskan untuk tidak memilih, maka ia tidak akan ikut dalam pemberian suara pada pemilihan umum. Perilaku memilih dalam pemilihan umum ditandai dengan memberikan pilihan pada pemilihan umum. Untuk lebih lanjut lihat Ramlan Surbakti (1992) Dalam M. Fachri Adnan. 2012. *Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang : UNP Press. Hal 38.

pemilihan bukan hanya sekedar perilaku yang bersifat individual, akan tetapi dipengaruhi oleh unsur refleksi struktur sosial budaya, ekonomi, dan politik. Artinya, individu dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Perilaku memilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan tindakan sesaat yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih partai politik atau calon tertentu dalam suatu pemilihan umum.<sup>9</sup>

Kajian mengenai perilaku memilih telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun psikologi. Oleh sebab itu, menurut Wattenberg, untuk melakukan kajian mengenai perilaku memilih harus menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional.<sup>10</sup> Dari tiga pendekatan ini akan menghasilkan bermacam-macam sikap dan perilaku individu dalam mengambil keputusan. Secara sederhana, pendekatan sosiologis ditandai dengan perilaku memilih masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapatan, ras, jenis kelamin, umur, status kewarganegaraan, agama, pekerjaan, serta budaya yang dianut.<sup>11</sup> Pendekatan psikologis ditandai dengan keputusan untuk memilih calon atau partai politik tertentu dalam suatu pemilihan umum diyakini sebagai produk dari sikap dan kedudukan psikis pemilih, pendekatan psikologis dipengaruhi oleh dua konsep, yakni *political involvement* dan *party*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal 38.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,



*identification*<sup>12</sup>. Pendekatan pilihan rasional dinilai apabila seseorang memilih berdasarkan pada alasan-alasan rasional, seperti ia memberi suara dan ia dapat apa. Pemberian suara yang dilakukan oleh individu diharapkan untuk mendapatkan *benefit* dari pilihannya, diantaranya menagih janji-janji kampanye yang dilakukan oleh partai politik ataupun calon kandidat.

Dewasa ini, penelitian mengenai perilaku memilih memang telah banyak dilakukan, dengan berbagai pendekatan yang digunakan dalam melihat bagaimana dan apa yang mempengaruhi perilaku memilih pada pemilihan umum. Pendekatan yang sering digunakan yaitu, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan rasional yang menghasilkan berbagai macam bentuk perilaku memilih dalam pemilihan umum dan memiliki cirinya masing-masing, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Arif<sup>13</sup>, penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal Yasmara<sup>14</sup>, dan

---

<sup>12</sup> *Political Involment* terjadi disaat pemilih menyadari bahwasanya keikutsertaannya dalam memilih pada pemilihan umum sangat diperluakan dalam proses politik. Dengan demikian, individu akan memiliki kepedulian politik yang tinggi, seperti terinovasi untuk mengikuti perkembangan isu-isu terkini serta menanggapi isu yang sedang berkembang. Puncaknya yaitu, muncul kesadaran bahwasanya berpolitik erat kaitannya dengan berorganisasi, dengan berorganisasi akan membangun legitimasi massa, sebab perjuangan akan sukar apabila dilakukan sendiri. Sedangkan *party identification*, kedekatan seseorang terhadap salah satu partai politik belum tentu mempengaruhi seseorang tersebut memilih dalam pemilihan umum. Konsep ini berdasarkan kepada kekuatan individu dalam mengevaluasi partai politik ataupun kandidat yang bakal ia pilih. Lebih lanjut M. Facri Adnan. *Ibid.*, Hal 42

<sup>13</sup> penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dalam meneliti perilaku memilih pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar. Dengan menggunakan variable identifikasi kepartaian, orientasi terhadap kandidat dan kedekatan dengan partai politik. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah, pemilih pemula di Kabupaten Tanah Datar, aktif mengikuti isu yang berkembang yang berorientasi kepada kandidat calon presiden. Pemilih pemula tidak terpengaruh oleh kedekatannya dengan partai politik dalam menentukan pilihan, walaupun ada kedekatan antara partai politik, namun pemilih pemula lebih cenderung untuk memilih sesuai dengan keinginan dan keyakinannya mengenai kandidat yang ia pilih. rujuk Ikhwan Arif. 2016. *Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

penelitian yang dilakukan oleh Reski Ferma Nanda<sup>15</sup> menyimpulkan bahwa pendekatan psikologis sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih pada saat pemilu.

Penelitian yang dilakukan diatas seakan luput dari masalah budaya yang dianut oleh masyarakat dilingkungan sosialnya. Pendekatan psikologis yang digunakan melihat orientasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi terhadap isu yang sedang berkembang, yang menjadi pengaruh bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Apabila kita meninjau sedikit mengenai perilaku politik, terdapat pengaruh yang secara signifikan dari budaya yang dianut oleh pemilih. Peranan budaya melatarbelakangi keputusan yang diambil oleh individu dalam mengambil keputusan politiknya, seperti yang kita ketahui bahwasanya mencoblos salah satu kandidat ataupun partai politik dalam bilik suara merupakan suatu keputusan politik<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dalam melihat perilaku memilih masyarakat Kabupaten Pasaman pada Pilkada Tahun 2015. Variable yang digunakan pada penelitian ini yaitu orientasi kedaerahan, orientasi kandidat, etnisitas, dan retrospektif voter. Masyarakat Pasaman yang dikenal dengan keberagaman etnis seperti Minang, Mandailing dan Jawa. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwasanya, masyarakat Pasaman memilih dalam pilkada dipengaruhi oleh etnisitas, kandidat yang berasal dari etnisnyalah yang akan dipilih, walaupun ia tidak mengetahui wajah kandidat, *track record* kandidat yang ia pilih. Rujuk Yusrizal Yasmari., *Op.cit.*,

<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dengan menggunakan variable orientasi kepartaian, orientasi kandidat, orientasi terhadap isu yang berkembang. Perilaku memilih masyarakat Kota Baru pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipengaruhi oleh ketiga variable tersebut. Lebih lanjut Rezki Ferma Nanda. 2018. *Perilaku Memilih Masyarakat Di Kecamatan Kota Baru Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

<sup>16</sup> Perilaku Politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yang melakukan proses kegiatan politik itu adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut dibagi dalam dua fungsi, yaitu, fungsi-fungsi politik pemerintahan dipengang oleh pemerintah, dan fungsi-fungsi politik dipegang oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut berada di struktur yang berbeda, fungsi-fungsi politik pemerintahan tergolong kedalam Supra struktur, sedangkan fungsi-fungsi politik masyarakat tergolong kedalam infra struktur. Perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu subjek, subjek tersebut dapat berupa pemerintah maupun masyarakat. Apabila subjeknya pemerintah, biasanya tindakan yang dilakukan

Yang artinya, perilaku memilih sangat dominan dipengaruhi oleh faktor budaya yang dianut oleh individu, keyakinan, agama memiliki peran dalam membentuk individu dalam memutuskan siapa yang akan ia pilih, hal ini didasari bahwasanya budaya telah memainkan peranannya sedari dini kepada individu dalam membentuk suatu perilaku, yang sehingganya berdampak kepada keputusan politik yang dilakukan dan diambil oleh individu.<sup>17</sup>

Indonesia sebagai negara pluralisme yang memiliki berbagai budaya, agama, etnis, suku dan keyakinan yang dianut dalam lingkungan sosial masyarakat, yang salah satunya adalah etnis Minangkabau yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan daerah yang mayoritas penduduknya dihuni oleh masyarakat etnis Minangkabau. Pemahaman mengenai wilayah, ruang dan keberadaan

---

oleh pemerintah berupa pembuatan keputusan-keputusan politik, dan upaya dalam pelaksanaan keputusan politik tersebut. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh pemerintah yang sesuai dengan kepentingannya.

Perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik yang oleh Almond dan Verba di artikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik yang aneka ragam bagiannya, serta sikap peranan warga negara didalam sistem itu. Dengan demikian memahami perilaku politik berarti menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan warga negara dalam sistem politik. Kajian tentang perilaku politik seringkali dilakukan dari sudut pandang psikologis, walupun pada pendekatan lainnya juga menjelaskan seperti pendekatan struktural fungsional dan pendekatan struktural konflik. Kajian dari sudut pandang psikologis akan lebih menjelaskan secara rinci pertimbangan-pertimbangan mengenai latar belakang menyeluruh, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertimbangan kepentingan lainnya.

Perilaku politik masyarakat secara individu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang, baik dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan penegakan keputusan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti lingkungan sosial politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, dan faktor sosial politik langsung yang berupa situasi. Lebih lanjut Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press. Hal 3. Dan Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo. Hal 167.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti., *Ibid*,

Minangkabau secara lazim disebut sebagai Alam Minangkabau. Hal ini memiliki pengertian bahwa, Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat memiliki dua daerah besar yang disebut sebagai daerah *darek*<sup>18</sup> dan *pasisie*<sup>19</sup>. Wilayah *darek* termasuk dalam tiga *Luhak* atau subwilayah, yaitu *Luhak* Agam, yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Agam, *Luhak* Tanah Datar, yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Tanah Datar, dan *Luhak* 50 Koto, yang termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan untuk wilayah *Pasisie* termasuk wilayah rantau yang berada di luar wilayah *Darek*, seperti Kota Padang, Pasaman dan Kota Solok.

Minangkabau berkembang pada abad ke-14 yang diawali dengan kemunculan Kerajaan Pagaruyuang yang dipimpin oleh Raja Adityawarman. Kemunculan kerajaan ini sekaligus memperkenalkan sistem kerajaan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat.<sup>20</sup> Budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat telah memainkan perannya dalam membentuk kehidupan sosial dan politik dilingkungan masyarakat. Norma, aturan dan nilai yang dimiliki oleh budaya Minangkabau telah membentuk keselarasan masyarakat yang dikenal dengan Alam Minangkabau yang memiliki norma dan aturannya sendiri yang berbeda dengan

---

<sup>18</sup> Daerah *darek* meliputi darat, daerah dataran tinggi atau pegunungan.

<sup>19</sup> Daerah *pasisie* meliputi daerah pesisir, daerah pantai atau yang disebut sebagai daerah rantau.

<sup>20</sup> Anonim. Asal-Usul Sumatera Barat-Sejarah Minangkabau. Atau dapat diakses di <http://2.bp.blogspot.com/-fUxtr0kRFds/UqNG6QuiUal/AAAAAAAAACew/LdzhZWYbPJA/s1600/Masyarakat+Minang=asal+usul.jpg>  
Diakses Pada 21 Desember 2019, Pukul 23.30 WIB.



budaya lainnya di Indonesia. Peranan budaya, norma, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Minangkabau memberikan pengaruh kepada masyarakat baik dilingkungan sosial, ekonomi dan politik. Yang artinya, norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Minangkabau memberikan pengaruh sedari dini kepada masyarakat dalam setiap berkegiatan dilingkungan sosial serta pengambilan keputusan dilingkungan politik.

Refleksi nilai-nilai budaya Minangkabau salah satunya pada saat pemilihan umum berlangsung, masyarakat Minangkabau memilih pemimpin dengan melihat sifat *takah*, *tageh* dan *tokoh* pemimpin tersebut. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Nursyirwan Effendi, bahwasanya pemilih melihat sifat *takah*, *tokoh* dari pemimpin tersebut sebelum melakukan pemilihan.<sup>21</sup>

### **1.2. Rumusan Masalah**

Pilpres tahun 2019 bisa disebut sebagai ajang lanjutan pertarungan antara Joko Widodo atau yang biasa dikenal dengan Jokowi melawan Prabowo Subianto, hal ini didasari pada pilpres tahun 2014, Jokowi dan Prabowo Subianto merupakan dua kandidat yang bertarung sebagai calon Presiden Republik Indonesia<sup>22</sup>. Pelaksanaan pilpres tahun 2019 diikuti oleh dua kandidat, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>21</sup> Nursyirwan Effendi. 2014. *Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol 4. No 1.

<sup>22</sup> Pelaksanaan Pilpres tahun 2014, Diikuti oleh dua kandidat, yakni Paslon (01) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan Paslon (02) Jokowi-Jusuf Kalla. Pelaksanaan pilpres tahun 2014 dimenangkan oleh paslon (02) Jokowi-Jusuf Kalla dengan perolehan 70.997.851 (53.15%) suara, dengan memenangkan pemilihan di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua

**Tabel 1.1**  
**Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Tahun 2019**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
01	Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr (H.C). KH. Ma'ruf Amin	PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, NASDEM, PKPI, HANURA, PSI, PERINDO
02	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	GERINDRA, PAN, PKS, DEMOKRAT

*Sumber : Data Sekunder KPU Tahun 2019.*

Pilpres tahun 2019 diikuti oleh dua kandidat yang mempunyai latar belakang dan visi misi yang berbeda. Disatu pihak, Jokowi sebagai calon petahana ingin menyelesaikan program-program yang belum terakomodir pada masa pemerintahan sebelumnya dan mengusung program baru yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar), sedangkan Prabowo Subianto mengusung visi dan misi adil makmur, serta berencana melakukan berbagai sewasembada seperti wasembada pangan dan wasembada energi agar Negara Indonesia tidak banyak impor dari luar negeri. Di lingkungan Wakil Presiden, Sandiaga Uno mewakili kaum millennial, karena ia memiliki ketampanan, berusia muda dan dianggap kekinian. Sementara itu KH Ma'ruf Amin mewakili kaum Ulama, karena ia merupakan seorang ulama besar di Indonesia. Prabowo Subianto mewakili orang yang mempunyai ketegasan dan berwibawa karena ia berasal dari kalangan militer dan memiliki jiwa patriotisme, sedangkan Joko Widodo dianggap lebih dekat dengan rakyat dan santun karena ia berasal dari masyarakat sipil dan ia

Barat dan Luar Negeri. Sedangkan untuk paslon (01) Prabowo-Hatta Rajasa mendapatkan 62.576.444 (46.26%) suara dengan memenangkan pemilihan di Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selisih suara yaitu 8.421.389 suara yang sehingganya memastikan Paslon 02 Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada masa jabatan 2014-2019.

juga merupakan seorang negarawan, karena pernah menjabat menjadi seorang Walikota, Gubernur dan juga sebagai Capres petahana.

Pelaksanaan pilpres tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 (55.32%) suara, perolehan suara ini didapatkan dengan kemenangan di 20 Provinsi di Indonesia<sup>23</sup>, serta Luar Negeri. Untuk paslon (02) Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan 68.650.239 (44.68%) suara, dengan memenangkan 14 provinsi di Indonesia<sup>24</sup>.

Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu Provinsi yang menjadi lumbung suara bagi Prabowo Subianto, baik pelaksanaan pilpres tahun 2014 maupun pilpres tahun 2019. Pelaksanaan Pilpres Tahun 2019 di Sumbar dimenangkan oleh Prabowo dengan selisih suara yang cukup jauh, rekapitulasi perolehan suara pilpres Tahun 2019 di Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden Tingkat**  
**Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2019.**

No	Kabupaten	Perolehan Suara	Partisipasi

<sup>23</sup> Kemenangan Jokowi di 20 Provinsi yang ada di Indonesia yaitu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Untuk lebih lanjut lihat Rekapitulasi Perolehan Suara Presiden Tahun 2019, lihat di <https://pemilu.2019.kpu.go.id/#ppwp/hitung-suara/> Diakses pada tanggal 21 September 2019, Pukul 23.34 WIB.

<sup>24</sup> Kemenangan Prabowo Subianto di 14 Provinsi di Indonesia yaitu, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. Untuk lebih lanjut lihat Rekapitulasi Perolehan Suara Presiden Tahun 2019, lihat di <https://pemilu.2019.kpu.go.id/#ppwp/hitung-suara/> Diakses pada tanggal 21 September 2019, Pukul 23.34 WIB.

		<b>Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr (H.C). KH. Ma'ruf Amin</b>	<b>H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno</b>	<b>(%)</b>
1	Agam	25.502	231.383	69.22%
2	Dharmasraya	38.733	87.584	84.53%
3	Kepulauan Mentawai	40.978	9.210	77.66%
4	Kota Bukittinggi	7.926	55.019	73.38%
5	Kota Padang	63.418	405.842	75.61%
6	Kota Padang Panjang	3.993	27.645	80.21%
7	Kota Pariaman	4.221	46.478	81.32%
8	Kota Payakumbuh	9.532	64.234	81.39%
9	Kota Sawahlunto	7.091	31.418	82.68%
10	Kota Solok	4.955	35.611	81.66%
11	Lima Puluh Kota	25.697	185.562	79.31%
12	Padang Pariaman	20.557	193.652	67.38%
13	Pasaman	13.638	146.392	78.89%
14	Pasaman Barat	34.658	183.087	81.19%
15	Pesisir Selatan	36.876	229.511	77.91%
16	Sijunjung	15.705	110.012	78.90%
17	Solok	17.985	187.751	71.71%
18	Solok Selatan	14.134	78.939	78.13%
19	Tanah Datar	22.039	175.934	70.35%
	Jumlah	407. 638	2.485.265	78.98%



(Persentase)

(14.09%)

(85,91%)

---

Sumber : *Data Sekunder KPU Tahun 2019.*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Prabowo memenangkan pemilihan di 18 kab/kota yang ada di Sumatera Barat, sedangkan Jokowi memenangkan pemilihan di 1 Kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Notabene dihuni oleh masyarakat yang beretnis Mentawai, untuk 18 Kab/Kota yang menjadi tempat kekalahan Jokowi merupakan penduduk yang mayoritas dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minangkabau. Walaupun pada saat sebelumnya, pada masa kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat di Sumatera Barat, terdapat dukungan terang-terangan dari 12 kepala daerah untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres Tahun 2019<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Kampanye yang merupakan suatu cara promosi dalam politik bisa diartikan bagaimana kandidat dan institusi politik tersebut mampu mempengaruhi masyarakat dengan memberikan citra yang baik melalui pemberian slogan, platform partai atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa melekat dibenak masyarakat. Kampanye politik memang harus bisa menyentuh lapisan dasar dari masyarakat. Pada saat kampanye akbar yang dilakukan oleh calon presiden No Urut 01 Joko Widodo- Maruf Amin di kawasan Danau Cimpago kota Padang, pada hari Selasa Tanggal 9 April 2019, juga diikuti oleh 12 kepala daerah, dimana 12 kepala daerah yang ikut serta dalam kampanye tersebut secara bergantian berorasi didepan pendukung Jokowi. 12 orang Bupati dan Walikota yang hadir dan ikut serta dalam kampanye tersebut ialah Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmidzi, Bupati Kabupaten Solok Gusmal, Walikota Solok Zul Elfian, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Walikota Padang Panjang Fadli Amran, Walikota Pariaman Genius Umar, dan Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni. Setiap kepala daerah yang hadir telah mendapatkan izin cuti untuk mengikuti kampanye, dimana setiap kepala daerah yang berkampanye diberikan waktu masing-masing 1 menit untuk orasi didepan pendukung Jokowi. Dalam kesempatan itu, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi meminta pendukung yang hadir untuk membuktikan Sumbar adalah Jokowi, ia juga menyampaikan bahwasanya Jokowi bukanlah PKI, dan juga bukan antek asing. Sedangkan Bupati Pasaman mengatakan keoptimisannya bahwasanya di Pasaman Jokowi akan mendapatkan 51% suara dari masyarakat Pasaman, Kampanye akbar tersebut dimeriahkan oleh grup band Slank, dan juga di hadiri oleh Wamen ESDM Archandra Tanhar dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Untuk lebih lanjut lihat Koran Media Indonesia dengan judul berita 12 Kepala Daerah Di Sumbar Berorasi dalam Kampanye Akbar Jokowi. Terbit pada Rabu 10 April 2019. Atau akses di (<https://mediaindonesia.com/read/detail/228703-12-kepala-daerah-di-sumbar-berorasi-dalam-kampanye-akbar-jokowi>)

Menurut Asrinaldi, kekalahan Jokowi pada Pilpres Tahun 2019 di Sumatera Barat dikarenakan budaya politik menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat Sumbar, Prabowo dipandang lebih memiliki karisma politik dibandingkan dengan Jokowi, sementara itu penampilan Prabowo apabila dibandingkan dengan Jokowi baik secara fisik ataupun kemampuan berbicara retorikanya dimiliki oleh Prabowo, dan Asrinaldi juga menjelaskan bahwa warga Minang yang merupakan mayoritas etnis di Sumatera Barat juga punya jargon yang disebut dengan 3T yaitu *Tagah Tageh* dan *Tokoh*. Menurut orang Minang, orang yang pantas menjadi pemimpin bukan saja orang yang berasal dari tokoh elit yang memiliki kelebihan dari masyarakat kebanyakan, tetapi juga orang yang memiliki kharisma (*takah*) dan gairah ataupun semangat (*tageh*).<sup>26</sup>

*Takah* secara harfiah memiliki pengertian enak dilihat atau dipandang. Secara konotatif, sifat *takah* ini pemahamannya mengacu kepada seseorang yang dianggap memiliki pancaran kharisma, pantas, layak atau patut bila diangkat sebagai pemimpin. Secara sederhana *takah* dicermati dari tampilan fisik, gerak gerik perilaku dan caranya berbicara.<sup>27</sup> *Tageh* diartikan sebagai ketegasan, berani, kuat, kokoh, dan berpendirian. Secara keseluruhan, masyarakat Minangkabau memberikan harapan kepada pemimpin tersebut untuk menjadi tumpuan harapan rakyat. *Tokoh* seperti halnya dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia, sebagai sifat yang didukung oleh

---

<sup>26</sup> Anonim. Analisis Faktor Kekalahan Jokowi Di Sumatera Barat Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47974094> Diakses Pada 10 September 2019. Pukul 23.47 WIB.

<sup>27</sup> Nursyirwan Effendi., *Op.Cit.*,

kemampuan SDM yang memadai, populer, memiliki elektabilitas, integritas dalam memimpin, selanjutnya melalui ketokohan masyarakat melihat apakah seseorang tersebut dapat menjadi tokoh bagi masyarakat yang mampu memberikan teladan serta layak *didahulukan selangkah dan ditinggian sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting). Secara skala yang lebih luas, tokoh juga dipandang sebagai orang yang memiliki keilmuan yang diakui, baik ilmu agama, adat istiadat dan akademik.<sup>28</sup>

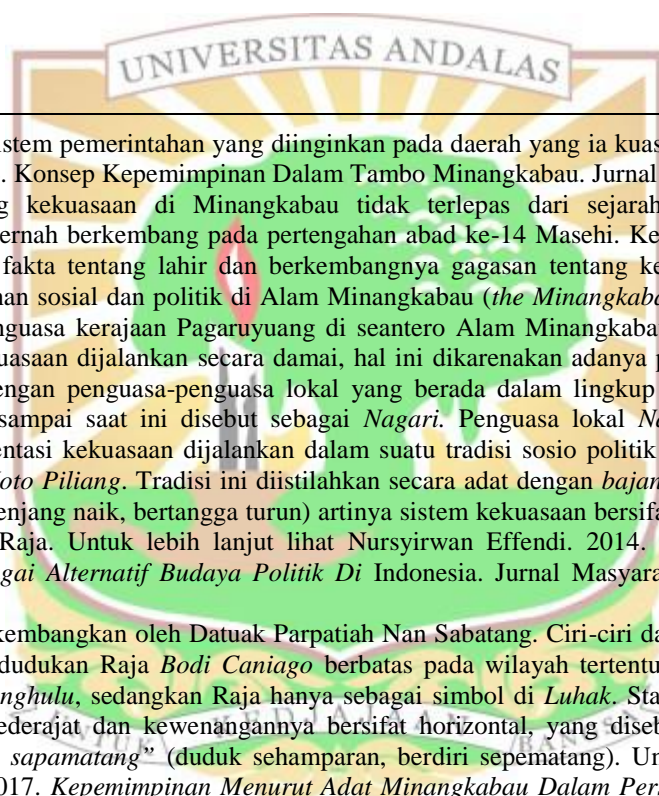
Kemunculan *takah, tageh* dan *tokoh* merupakan suatu bentuk pengaruh yang diberikan oleh norma, nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dalam memilih pemimpin. Masyarakat Minangkabau<sup>29</sup> secara historis

---

<sup>28</sup> Irwan Prayitno dalam Mesra Sukma Syahroel. *3T : Kriteria Orang Minang Memilih Pemimpin (Takah, Tageh, Tokoh)*. Blog Tentang Agama Islam dan Tokohnya. Atau dapat diakses di <http://mesrasukma.blogspot.com/2016/03/3t-kriteria-orang-minang-memilih-.html?m=1> diakses pada Tanggal 27 Oktober 2019. Pukul 21.23 WIB.

<sup>29</sup> Dalam memahami sejarah asal usul suku bangsa, asal usul negeri serta adat istiadat Minangkabau terdapat dalam *tambo*. *Tambo* bagi masyarakat Minangkabau merupakan karya sastra sejarah, menggunakan bahasa melayu yang banyak berpengaruh bahasa Minangkabau dan bentuk prosa bahasa biasa, bukan bahasa berirama. Dalam *tambo*, terdapat cerita mengenai sejarah munculnya Minangkabau yang diawali dengan pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang memiliki 39 orang anak. Anaknya yang bungsu Iskandar Zulkarnain menikah dengan bidadari di surga. Dari hasil pernikahannya dengan bidadari, Zulkarnain mempunyai tiga orang putra, yaitu Sultan Sri Maharaja Alif, Sultan Sri Maharaja Dipang, dan Sultan Sri Maharaja Diraja. Setelah baliq ketiga putra Zulkarnain sepakat untuk berlayar, tepatnya di pulau Langkapuri antara Bukit Siguntang. Singkat cerita akhirnya Sultan Sri Maharaja Dipang menjadi Raja di Negeri Cina, Sultan Sri Maharaja Alif menjadi Raja di Negeri Rum, dan Sultan Sri Maharaja Diraja menjadi Raja di Minangkabau. Dalam silsilah Datuak Katumanggungan, Datuak Perpatih Sabatang, dan Datuak Sri Maharajo Nego-Nego disebutkan bahwa Datuak yang dipertuan menikah dengan Indo jati di Pariangan Padang Panjang, dan mempunyai seorang anak laki-laki. Setelah Datuak yang Dipertuan mangkat, Indo Jati menikah lagi dengan Cati Bilang Pandai. Dari pernikahannya dengan Cati Bilang Pandai, Indo Jati mempunyai dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Ketiga anak laki-laki Indo Jati ini diangkat menjadi penghulu di negeri Pariangan Padang Panjang, bergelar Datuak Katumanggungan (anak dari daulat yang Dipertuan), Datuak Parpatih Sabatang dan Datuak Sri Maharajo Nego-Nego (anak dari Cati Bilang Pandai). Datauak Katumanggungan dan datuak Parpatiah nan Sabatang dikenal sebagai orang yang sakti dan lihai dalam berkelahi, bahkan sampai besarpun kedua tokoh ini masih bertentangan dalam menentukan sistem pemerintahan. Sampai sehingganya pada suatu kesepakatan

telah mengenal sistem kemasyarakatan, pola pemerintahan dan sistem kekuasaan<sup>30</sup> yang secara umum dikenal yaitu *Bodi Caniago*<sup>31</sup> dan *Koto Piliang*<sup>32</sup>. Masyarakat Minangkabau tidak menamakan susunan masyarakat sebagai masyarakat yang berketurunan ibu, tetapi menamakan sistem keturunan menurut keturunan ibu<sup>33</sup>. Pemimpin di Minangkabau disebut sebagai Penghulu yang mana pemilihannya



akan menerapkan sistem pemerintahan yang diinginkan pada daerah yang ia kuasai. Untuk lebih lanjut lihat Suryami. 2014. Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau. Jurnal kandai. Vol 10. No 2  
<sup>30</sup> Gagasan tentang kekuasaan di Minangkabau tidak terlepas dari sejarah kehadiran kerajaan Pagaruyung yang pernah berkembang pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Keberadaan kerajaan ini memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan yang secara integral dalam tatanan sosial dan politik di Alam Minangkabau (*the Minangkabau World*) melalui hal inilah kekuatan penguasa kerajaan Pagaruyung di seantero Alam Minangkabau dan Daerah Rantau Minangkabau. Kekuasaan dijalankan secara damai, hal ini dikarenakan adanya pembagian kekuasaan (*power sharing*) dengan penguasa-penguasa lokal yang berada dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat yang sampai saat ini disebut sebagai *Nagari*. Penguasa lokal *Nagari* disebut dengan *Penghulu*. Implementasi kekuasaan dijalankan dalam suatu tradisi sosio politik yang dikenal dengan istilah aristokrasi *Koto Piliang*. Tradisi ini diistilahkan secara adat dengan *bajanjang naiak, batanggo turun* (harfiah: berjenjang naik, bertangga turun) artinya sistem kekuasaan bersifat hirarkis dari tingkat bawah sampai ke Raja. Untuk lebih lanjut lihat Nursyirwan Effendi. 2014. *Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik Di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Indonesia. No 1. Vol. 40.

<sup>31</sup> *Bodi Caniago* dikembangkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Ciri-ciri dari pemerintahan *Bodi Caniago* adalah kedudukan Raja *Bodi Caniago* terbatas pada wilayah tertentu dan di *Luhak* yang berkuasa adalah *Penghulu*, sedangkan Raja hanya sebagai simbol di *Luhak*. Status *Penghulu* di *Bodi Caniago* bersifat sederajat dan kewenangannya bersifat horizontal, yang disebut dengan “*duduak sahamparan, tagak sapamatang*” (duduk sehamparan, berdiri sepematang). Untuk lebih lanjut lihat Romi Andrianto. 2017. *Kepemimpinan Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Etika Alasdair Macintyre*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

<sup>32</sup> *Koto Piliang* dikembangkan oleh Datuak Katumangguangan. Ciri-ciri kerajaan dan pemerintahannya sebagai berikut, Raja *Koto Piliang* adalah Kepala yang menguasai seluruh alam Minangkabau, oleh sebab itu diberi gelar Raja Alam. status *Penghulu* di *Koto Piliang* bertingkat-tingkat dan wewenangnya bersifat vertikal, atau yang dikenal dengan “*bajanjang naiak, batanggo turun*” (berjenjang naik, bertangga turun). Untuk lebih lanjut lihat Andrianto. *Ibid.*,

<sup>33</sup> Sistem matrilineal yang dianut dalam masyarakat Minangkabau mendasari pada garis keturunan pada ibu. Kehadiran kaum perempuan sangat di junjung tinggi oleh masyarakat minangkabau, dalam pewarisan harta pusaka, wanita diberikan hak milik sebagai pewaris keturunan, sedangkan kaum laki-laki (*Mamak*) diberikan hak pakai yang artinya diberikan kebebasan untuk mengelola pusaka seperti sawah ataupun ladang, apabila keadaan mendesak dan diwajibkan untuk menjaga harta pusaka. Nasroen dalam Andrianto. *Ibid.*,



dilakukan dengan cara musyawarah yang menghasilkan mufakat.<sup>34</sup> Adat istiadat yang telah dianut sejak dahulunya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau, adat melingkupi keseluruhan masyarakat Minangkabau, adat juga membentuk sebuah ideology hegemoni yang melegitimasi dan menstrukturkan kehidupan seremonial dan politik disuatu nagari, serta adat juga merepresentasikan norma ideal dalam berperilaku.<sup>35</sup>

Dalam berperilaku, masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh adat istiadat serta budaya yang telah dianut sejak dahulunya, tidak terkecuali berperilaku dalam memilih pemimpin pada pemilu, seperti yang telah dijelaskan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih sebelumnya, budaya sangat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, hal ini dapat kita jumpai dalam perilaku memilih masyarakat Minangkabau dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Marinas M yang merupakan masyarakat Kuning Bukit Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu :

*“ambo mamilih prabowo dek inyo bakeh pamimpin kopasus, pastilah tegasnyo dalam mamimpin negara. Kalo jokowi kan dapek samo-samo wak caliak, ndak cocok jadi presiden, dari tagak selah dapek wak caliak kalo jokowi ndak tegap, apolagi kalo ketegasanyo dalam mamimpin yang pasti ndak sategas prabowo<sup>36</sup>.”* (saya memilih Prabowo dikarenakan ia merupakan

<sup>34</sup> Mina Elfira. 2013. *Model Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal di Minangkabau Dan Bugis*. Departemen Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Kuning Bukit, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Dalam wawancara yang dilakukan tersebut, peneliti mengajak Marimas M yang merupakan masyarakat etnis minangkabau serta bekerja sehari-hari sebagai tukang bangunan untuk berbicara mengenai politik yang sedang berjalan di Indonesia yang pada akhirnya pembicaraan memasuki pembahasan mengenai pilihan presiden pada pilpres yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pada hari pemilihan, ia memilih Prabowo dilatarbelakangi ketegasan

bekas pemimpin Kopassus, yang pastinya tegas dalam memimpin negara kedepannya. Berbeda dengan Jokowi apabila kita lihat, ia tidak cocok menjadi presiden, ketika berdiri saja kita lihat Jokowi tidak tegap, apalagi dalam masalah memimpin, pastilah Jokowi tidak setegas Prabowo).

Dari hasil wawancara tersebut Marinas M yang ikut serta dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto yang disebabkan oleh adanya ketegasan, kewibawaan serta ketegasan dalam memimpin. Jokowi dipandang tidak memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam memimpin negara. Dalam satu hal, Marinas M memilih Prabowo dikarenakan bukan partai politik yang mengusungnya, dan tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang mengenai Prabowo mengenai pelanggaran HAM yang ia lakukan pada tahun 1998. Marinas M memilih Prabowo yang disebabkan latar belakang yang telah membentuknya menjadi seorang yang dianggap Marinas M sebagai orang yang tegas, beribawa dan memiliki karisma dalam memimpin. Merujuk kepada hasil penelitian Ikhwan Arif, didapatkan suatu temuan bahwa pemilih memilih Prabowo dengan alasan latar belakang yang dimiliki oleh Prabowo, dan selanjutnya Prabowo lebih rapi dan memiliki karisma dari pada Jokowi<sup>37</sup>.

---

yang dimiliki oleh Prabowo, yang ditambah lagi bahwasanya Prabowo sendiri merupakan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, hal inilah yang menjadi dasar Marinas dalam menentukan pilihan kepada Prabowo, sebab di Indonesia sendiri kita kenal bahwasanya Kopassus merupakan pasukan yang didikan militernya tegas dan disegani. Marinas M yang telah berumur 68 tahun masih aktif menyaksikan berita yang dikabarkan oleh televisi. Wawancara dilakukan di Payakumbuh pada Minggu 22 September tahun 2019, pada pukul 13.20 WIB.

<sup>37</sup> Penelitian yang dilakukan Ikhwan Arif di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dengan melihat Perilaku Memilih Pemilih Pemula. Wawancara yang dilakukan dengan Oktariza Salah, ia memilih Prabowo dengan alasan *Kepribadian Prabowo terlihat lebih berwibawa dibandingkan Jokowi, itu dapat dilihat dari penampilan Prabowo yang lebih rapi dibandingkan sosok Jokowi yang terlihat kurang rapi. Selain itu Prabowo adalah seorang mantan petinggi militer yang tegas sehingga pantas untuk menjadi pemimpin.* Rujuk Ikhwan Arif. *Op.Cit.*,

Budaya masyarakat Minangkabau dalam memilih pemimpin dengan memandang *takah*, *tageh* dan *tokoh* merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Munculnya persepsi terhadap *takah*, *tageh* dan *tokoh* merupakan bentuk refleksi budaya dari masyarakat Minangkabau dalam memilih pemimpin, dimana calon pemimpin yang tergolong kedalam kriteria *takah*, *tageh* dan *tokoh* disebut sebagai pemimpin yang cocok dan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat.

Penelitian ini menjelaskan perilaku memilih masyarakat Minangkabau pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, Joko Widodo sebagai petahana mengalami kekalahan di Sumatera Barat, apabila kita merujuk kepada Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014 Joko Widodo juga mengalami kekalahan di Sumatera Barat dengan lawan yang sama yaitu Prabowo Subianto, sedangkan untuk Wakil Presiden berbeda dari tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini menjelaskan pada konteks Presiden saja, sedangkan Wakil Presiden tidak dibahas lebih mendalam, karena penelitian ini juga berpatokan pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 dimana Ma'ruf amin dan Sandiaga Uno tidak ikut serta pada kontestan pemilihan tahun 2014.

Dari gambaran kasus diatas, yang menarik dari penelitian ini adalah, perilaku memilih masyarakat Minangkabau dalam memilih pemimpin pada pemilihan presiden tahun 2019 di Sumatera Barat, dimana masyarakat Minangkabau memandang sifat *takah*, *tageh* dan *tokoh* yang dimiliki oleh kandidat sebelum memilihnya. Dari penjelasan yang dijabarkan tersebut, kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Pengaruh *Takah*, *Tageh* Dan *Tokoh* Terhadap Perilaku

Memilih Masyarakat Sumatera Barat Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Permasalahan diatas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu : **Bagaimana Pengaruh *Takah, Tageh* dan *Tokoh* Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Minangkabau Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sumatera Barat ?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

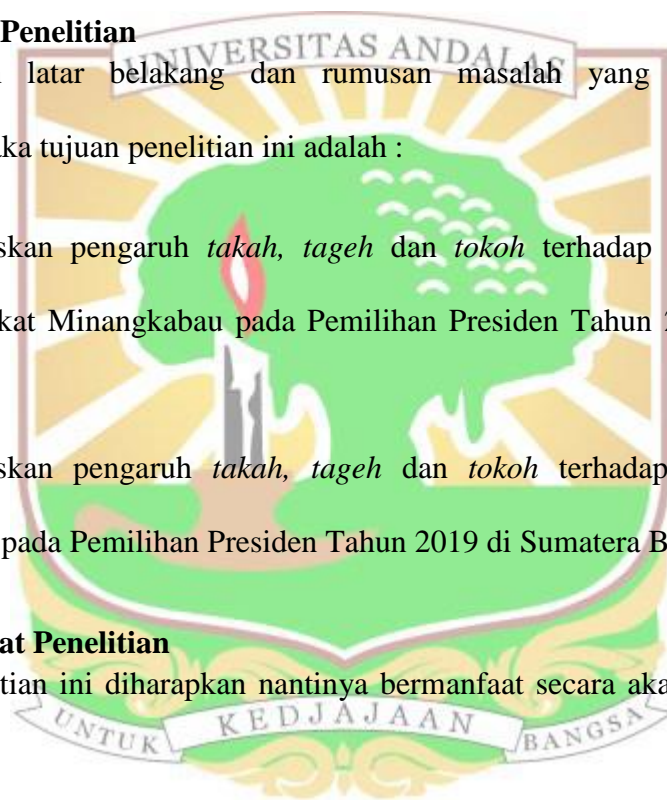
1. Menjelaskan pengaruh *takah, tageh* dan *tokoh* terhadap perilaku memilih masyarakat Minangkabau pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sumatera Barat.
2. Menjelaskan pengaruh *takah, tageh* dan *tokoh* terhadap kekalahan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sumatera Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini menganalisis serta menjelaskan perilaku memilih masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Minangkabau dalam memilih pemimpin, serta menjelaskan pengaruh *takah, tageh* dan *tokoh* terhadap kekalahan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Sumatera





Barat. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam membahas perilaku memilih masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Minangkabau, serta pengaruh *takah*, *tageh* dan *tokoh* dalam masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Minangkabau dalam memilih pemimpin.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembaca yang bertujuan untuk memperdalam wawasan mengenai perilaku memilih masyarakat Sumatera Barat yang beretnis Minangkabau dalam memilih pemimpin.

